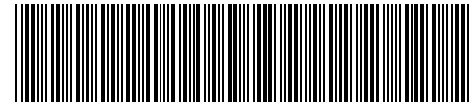




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663322/2025**



DS:0440-6920-7114-1345

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06

Tanggal : 24 Oktober 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
4. Kode>Nama Satker : (663322) PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN
- Sebesar : Rp. 82.899.000 (DELAPAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Jumlah Uang

Rp. 82.899.000
Rp. 82.899.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	82.899.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A D I U N (033) Rp. 82.899.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663322/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0440-6920-7114-1345

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663322) PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN

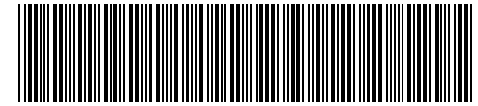
Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			82.899.000
Kegiatan	:	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			82.899.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		2. 01	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan Militer			
		3. 01	Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer			
		4. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		5. 02	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer			
		6. 03	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer			
		7. 04	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer			
		8. 05	Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan Militer			
		9. 06	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan Militer			
		10. 07	Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer			
		11. 08	Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	42,00	Perkara, Berkas Perkara	37.405.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	37,00	Perkara	37.215.000
		02	BCA.U05 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	5,00	Perkara	190.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	10,00	Perkara, Berkas Perkara	45.494.000
Rincian Output	:	01	QCA.001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	10,00	Perkara	45.494.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663322/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0440-6920-7114-1345

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663322) PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN
Kewenangan : (KD)

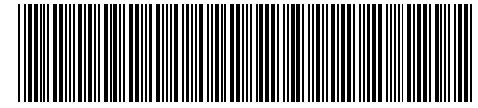
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663322	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	-	82.899	-	-	-	82.899		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	82.899	-	-	-	82.899		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	82.899	-	-	-	82.899		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (05.58 JAWA TIMUR / KOTA MADIUN)	-	37.405	-	-	-	37.405	05 . 58	
01	RM	-	37.405	-	-	-	37.405	033	
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (05.58 JAWA TIMUR / KOTA MADIUN)	-	45.494	-	-	-	45.494	05 . 58	
01	RM	-	45.494	-	-	-	45.494	033	
JUMLAH		-	82.899	-	-	-	82.899		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663322/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0440-6920-7114-1345

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (663322) PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN

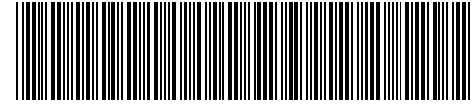
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663322	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	4.441	3.226	2.821	2.161	24.055	722	3.030	25.491	5.786	5.471	5.696	82.899
		BELANJA BARANG	0	4.441	3.226	2.821	2.161	24.055	722	3.030	25.491	5.786	5.471	5.696	82.899
	005.05.BF.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	0	4.441	3.226	2.821	2.161	24.055	722	3.030	25.491	5.786	5.471	5.696	82.899
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	4.441	3.226	2.821	2.161	24.055	722	3.030	25.491	5.786	5.471	5.696	82.899

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663322/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0440-6920-7114-1345

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [663322] PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN

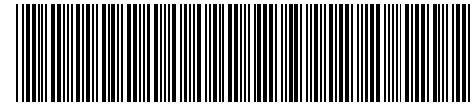
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663322/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0440-6920-7114-1345

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [663322] PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775